Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 490-501
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Representasi Kekuasaan dan Ketimpangan Sosial dalam Film Ozora

Revi Fahrezi Yahya, Novalia
Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika
revifahrezi@gmail.com, novatan07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi kekuasaan dan ketimpangan sosial dalam film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel melalui pendekatan semiotika Roland Barthes. Permasalahan penelitian berangkat dari penggambaran hubungan antara status sosial, kekayaan, dominasi, dan perbedaan akses terhadap keadilan yang dibangun melalui tanda audiovisual. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis makna denotasi, konotasi, dan mitos. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap enam adegan terpilih, dokumentasi, studi pustaka, serta wawancara pendukung dengan seorang anggota kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan direpresentasikan melalui kekerasan fisik, simbol kemewahan, relasi sosial, dan dukungan hukum yang berbeda. Pada tingkat denotasi, representasi tersebut tampak dalam tindakan tokoh, kendaraan, pakaian, ruang kepolisian, persidangan, serta respons masyarakat. Pada tingkat konotasi, tanda tersebut membentuk makna dominasi, privilese, ketidaksetaraan akses hukum, dan perjuangan memperoleh keadilan. Pada tingkat mitos, film menghadirkan gagasan mengenai kekuasaan sebagai pelindung, hukum yang dapat dipengaruhi, serta solidaritas publik sebagai kekuatan alternatif. Media sosial digambarkan sebagai sarana penyebaran informasi, pembentukan opini, dan mobilisasi dukungan masyarakat. Secara khusus, rangkaian adegan memperlihatkan pergeseran dari dominasi pelaku menuju perlawanan kolektif dan penyelesaian konflik melalui putusan pengadilan. Wawancara pendukung memperlihatkan perbedaan antara konstruksi naratif film dan pandangan aparat yang menekankan profesionalitas serta kesetaraan dalam penegakan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa representasi film tidak dapat langsung digeneralisasikan sebagai gambaran seluruh praktik institusional. Penelitian menyimpulkan bahwa film Ozora berfungsi sebagai media kritik sosial yang mempertanyakan hubungan kekuasaan, ketimpangan, dan keadilan, sekaligus memperlihatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses hukum. Kajian ini memperkaya penerapan semiotika Barthes pada pembacaan relasi kekuasaan dan akses keadilan dalam film Indonesia kontemporer.

Kata kunci: Representasi; Kekuasaan; Ketimpangan Sosial; Roland Barthes; Film

Abstract

This study aims to analyze the representation of power and social inequality in the film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel using Roland Barthes' semiotic approach. The research addresses the portrayal of relationships between social status, wealth, domination, and unequal access to justice constructed through audiovisual signs. This study employs a qualitative approach by analyzing denotation, connotation, and myth. Data were collected through observations of six selected scenes, documentation, literature studies, and a supporting interview with a police officer. The findings reveal that power is represented through physical violence, symbols of luxury, social relationships, and unequal legal assistance. At the denotative level, these representations appear through characters' actions, vehicles, clothing, police stations, courtrooms, and public responses. At the connotative level, these signs construct meanings of domination, privilege, unequal legal access, and struggles for justice. At the mythical level, the film presents ideas of power as protection, the susceptibility of law to influence, and public solidarity as an alternative source of power. Social media is portrayed as a means of disseminating information, shaping public opinion, and mobilizing collective support. The selected scenes illustrate a transition from domination to collective resistance and legal resolution. The supporting interview highlights differences between the film's narrative construction and institutional perspectives emphasizing professionalism and equality before the law. These findings indicate that cinematic representations cannot be generalized as reflections of institutional practices. This study concludes that Ozora functions as a medium of social criticism, questioning relationships between power, inequality, and justice while emphasizing public participation in legal oversight.

Keywords: Representation; Power; Social Inequality; Roland Barthes; Film

1. Pendahuluan

Film merupakan media audiovisual yang memiliki kemampuan menyampaikan pesan melalui gambar, suara, dialog, karakter, dan rangkaian cerita. Dalam konteks komunikasi, film tidak hanya berfungsi sebagai sarana

hiburan, tetapi juga menjadi medium penyampaian gagasan, nilai, dan fenomena yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Perkembangan teknologi digital turut memperluas akses masyarakat terhadap berbagai karya film melalui layanan streaming. Dalam penelitian ini, film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel yang diamati melalui platform Netflix dijadikan sebagai objek kajian untuk memahami representasi kekuasaan dan ketimpangan sosial dalam media audiovisual.

Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel tayang pada 9 April 2026 dengan durasi 149 menit dan disutradarai oleh Anggy Umbara serta Bounty Umbara. Film tersebut mengangkat kisah perjuangan Jonathan dalam mencari keadilan bagi David Ozora setelah mengalami tindakan penganiayaan. Alur cerita menampilkan hubungan antara keluarga korban, keluarga pelaku, institusi hukum, media sosial, dan masyarakat sebagai bagian penting dalam perkembangan konflik. Penggambaran persoalan kekuasaan, privilese, dan ketidakadilan menjadikan film ini relevan untuk dikaji karena menghadirkan berbagai tanda visual dan naratif yang mengandung makna sosial serta ideologis.

Representasi kekuasaan dalam film tidak hanya ditampilkan melalui kepemilikan jabatan formal, tetapi juga melalui status sosial, kekayaan, hubungan antartokoh, kemampuan memengaruhi pihak lain, tindakan intimidatif, serta perbedaan akses terhadap institusi. Sementara itu, ketimpangan sosial direpresentasikan melalui perbedaan perlakuan dan kesempatan yang diterima oleh individu atau kelompok berdasarkan kedudukan sosialnya. Dalam konteks film Ozora, ketimpangan tersebut dapat diidentifikasi melalui penggunaan simbol hunian dan kendaraan mewah, perbedaan perlakuan dalam institusi hukum, akses terhadap pendampingan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan. Berbagai representasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kekuasaan dan ketimpangan sosial dapat dibangun melalui unsur visual maupun naratif dalam film.

Permasalahan penelitian ini tidak hanya berfokus pada peristiwa yang ditampilkan secara langsung melalui adegan, tetapi juga pada makna sosial dan ideologis yang terkandung dalam setiap tanda. Dalam perspektif semiotika Roland Barthes, tanda dapat dianalisis melalui tiga tingkatan pemaknaan, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Denotasi berkaitan dengan makna yang terlihat secara langsung, konotasi berhubungan dengan makna yang terbentuk melalui nilai dan pengalaman sosial, sedangkan mitos menunjukkan bagaimana suatu makna dikonstruksi menjadi gagasan atau keyakinan yang dianggap wajar dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap gambar, kostum, latar, dialog, gestur, dan alur cerita untuk mengungkap representasi kekuasaan serta ketimpangan sosial yang dibangun dalam film.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas representasi sosial dan kekuasaan melalui berbagai pendekatan analisis media. Prasetya (2022) mengkaji representasi kelas sosial dalam film Gundala menggunakan semiotika Roland Barthes. Chaniago dan Sos (2019) meneliti representasi pendidikan karakter dalam film Surau dan Silek menggunakan pendekatan semiotika Ferdinand de Saussure. Sementara itu, Fitra et al. (2026) menganalisis representasi kekuasaan politik dalam film Dirty Vote melalui Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Penelitian lain juga membahas representasi nilai keluarga dan perempuan dalam film menggunakan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengkaji film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel dengan mengintegrasikan analisis representasi kekuasaan dan ketimpangan sosial menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes.

Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada perlunya kajian yang secara khusus mengungkap hubungan antara kekuasaan, privilese, akses terhadap hukum, dan perlawanan sosial melalui tanda-tanda audiovisual dalam film Ozora. Penelitian terdahulu telah membahas representasi kelas sosial maupun kekuasaan politik, tetapi belum secara khusus mengkaji keterkaitan kedua persoalan tersebut dalam objek film yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan alur cerita, tetapi juga menganalisis bagaimana tanda-tanda visual dan naratif membentuk pemaknaan mengenai dominasi kekuasaan, ketidaksetaraan akses hukum, dan solidaritas masyarakat melalui tingkatan denotasi, konotasi, dan mitos.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuasaan dan ketimpangan sosial direpresentasikan melalui makna denotasi, konotasi, dan mitos dalam film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk representasi kekuasaan serta ketimpangan sosial yang ditampilkan melalui tanda-tanda audiovisual dalam film. Kebaruan penelitian (novelty) terletak pada pengintegrasian kajian kekuasaan, ketimpangan akses hukum, dan perlawanan sosial dalam satu kerangka analisis semiotika Roland Barthes terhadap film Ozora. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi dan semiotika film, khususnya dalam memahami konstruksi makna kekuasaan dan ketimpangan sosial. Secara praktis, hasil penelitian

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14423
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kritis masyarakat terhadap penggunaan tanda dan simbol dalam media audiovisual yang merepresentasikan persoalan kekuasaan, ketidakadilan hukum, serta perjuangan memperoleh keadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan representasi kekuasaan serta ketimpangan sosial dalam film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemaknaan tanda audiovisual yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan, status sosial, dominasi, ketidaksetaraan akses hukum, dan perlawanan masyarakat. Analisis semiotika Roland Barthes diterapkan melalui tiga tingkatan pemaknaan, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos, untuk memahami bagaimana unsur visual dan naratif membentuk makna sosial serta ideologis dalam film.

2.1 Objek Penelitian dan Unit Analisis

Objek penelitian ini adalah film *Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel* yang disutradarai oleh Anggy Umbara dan Bounty Umbara, dirilis pada 9 April 2026 dengan durasi 149 menit. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan enam adegan sebagai unit analisis berdasarkan relevansinya terhadap representasi kekuasaan dan ketimpangan sosial. Kriteria pemilihan adegan meliputi: (1) adanya tindakan atau simbol yang menunjukkan dominasi kekuasaan, baik secara fisik maupun sosial; (2) adanya representasi perbedaan status ekonomi, privilese, dan akses terhadap institusi hukum; (3) adanya interaksi yang menggambarkan ketidaksetaraan perlakuan antara pihak korban dan pelaku; (4) adanya representasi perlawanan masyarakat melalui media sosial dan solidaritas kolektif; serta (5) adanya tanda visual dan naratif yang memungkinkan analisis denotasi, konotasi, dan mitos berdasarkan semiotika Roland Barthes.

Enam adegan dipilih karena mewakili perkembangan konflik kekuasaan dan perjuangan memperoleh keadilan dalam alur cerita. Adegan pertama (00:05:20–00:13:45) memperlihatkan kekerasan fisik sebagai bentuk dominasi kekuasaan yang diperkuat oleh simbol kemewahan. Adegan kedua (00:22:15–00:24:54) menggambarkan ketimpangan akses hukum melalui perbedaan perlakuan terhadap pihak korban dan pelaku. Adegan ketiga (00:48:18–00:49:07) menunjukkan peran media sosial sebagai sarana kritik dan pembentukan opini publik. Adegan keempat (01:17:25–01:21:22) merepresentasikan ketidaksetaraan dalam proses persidangan dan pendampingan hukum. Adegan kelima (01:25:32–01:34:50) menampilkan solidaritas masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi kekuasaan. Sementara itu, adegan keenam (01:35:37–01:37:44) menggambarkan penyelesaian konflik melalui putusan pengadilan sebagai simbol perjuangan memperoleh keadilan.

Pemilihan keenam adegan tersebut didasarkan pada keragaman bentuk representasi kekuasaan dan ketimpangan sosial yang ditampilkan, sekaligus keterkaitannya dalam membentuk perkembangan narasi dari dominasi, ketidakadilan, perlawanan, hingga penyelesaian konflik. Unit analisis penelitian mencakup tanda audiovisual berupa dialog, ekspresi tokoh, gestur, kostum, latar tempat, penggunaan benda simbolis, sudut pengambilan gambar, dan interaksi antartokoh. Setiap adegan dianalisis melalui tiga tingkatan pemaknaan Roland Barthes, yaitu denotasi untuk mengidentifikasi makna langsung, konotasi untuk menginterpretasikan makna sosial dan budaya, serta mitos untuk mengungkap gagasan ideologis yang dibangun melalui representasi film. Dengan demikian, kriteria pemilihan adegan dan unit analisis dijelaskan secara eksplisit agar proses penelitian dapat ditelusuri dan dipahami secara sistematis.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara pendukung. Observasi dilakukan terhadap adegan-adegan dalam film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel yang diamati melalui platform Netflix. Pengamatan difokuskan pada unsur visual dan naratif yang menggambarkan hubungan kekuasaan, dominasi, status sosial, ketimpangan hukum, serta respons masyarakat terhadap konflik yang ditampilkan. Dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi adegan berdasarkan waktu kemunculan, tindakan tokoh, dialog, latar, dan simbol audiovisual yang relevan dengan fokus penelitian.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14423
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Studi pustaka dilakukan dengan menggunakan literatur mengenai representasi, kekuasaan, ketimpangan sosial, serta teori semiotika Roland Barthes sebagai landasan konseptual dalam menginterpretasikan tanda. Selain itu, penelitian didukung oleh wawancara dengan Bripda Yanuar Arbiansyah pada 16 Juni 2026. Wawancara tersebut memberikan perspektif anggota kepolisian mengenai kesetaraan perlakuan hukum, profesionalitas aparat, pengaruh status sosial, serta tekanan publik melalui media sosial. Data wawancara digunakan sebagai informasi pendukung dan pembanding terhadap representasi yang dibangun dalam film, bukan sebagai dasar untuk menggeneralisasikan kondisi penegakan hukum secara keseluruhan.

Wawancara pendukung melibatkan satu informan, yaitu Bripda Yanuar Arbiansyah, anggota kepolisian yang memberikan perspektif mengenai persoalan penegakan hukum. Pemilihan informan didasarkan pada relevansi latar belakang profesinya dengan isu yang dikaji, khususnya kesetaraan perlakuan hukum, pengaruh status sosial, profesionalitas aparat, dan tekanan publik melalui media sosial. Wawancara dilaksanakan pada 16 Juni 2026 dan menghasilkan keterangan yang digunakan untuk melengkapi interpretasi terhadap representasi hukum dalam film. Data wawancara dibandingkan dengan hasil analisis semiotika terhadap enam adegan serta literatur yang relevan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan perspektif. Pembandingan ini bersifat kontekstual karena data film merupakan konstruksi naratif, sedangkan wawancara mencerminkan pandangan seorang informan. Oleh karena itu, hasil wawancara tidak digunakan untuk memverifikasi kebenaran seluruh peristiwa dalam film ataupun menggeneralisasikan praktik penegakan hukum secara institusional.

2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes melalui tiga tingkatan pemaknaan, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Proses analisis diawali dengan mengidentifikasi tanda audiovisual dalam enam adegan terpilih yang berkaitan dengan representasi kekuasaan dan ketimpangan sosial. Setiap adegan kemudian dianalisis berdasarkan hubungan antara unsur visual, dialog, tindakan tokoh, dan konteks naratif untuk mengungkap makna yang terkandung di dalamnya.

Tahap pertama adalah analisis denotasi, yaitu mengidentifikasi makna langsung dari tanda yang ditampilkan dalam adegan. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan tindakan tokoh, pakaian, kendaraan, latar tempat, ekspresi, dialog, serta situasi yang terlihat secara objektif. Tahap kedua adalah analisis konotasi, yaitu menginterpretasikan makna sosial dan budaya yang muncul dari hubungan antartanda. Pada tahap ini, simbol kemewahan dikaitkan dengan status sosial, tindakan kekerasan dengan dominasi kekuasaan, perbedaan pendampingan hukum dengan ketimpangan akses keadilan, serta penggunaan media sosial dengan pembentukan solidaritas masyarakat.

Tahap ketiga adalah analisis mitos, yaitu mengidentifikasi gagasan dan ideologi yang dibangun melalui representasi dalam film. Analisis diarahkan pada pemaknaan mengenai kekuasaan sebagai sumber perlindungan, privilese yang berkaitan dengan akses hukum, ketidaksetaraan dalam memperoleh keadilan, serta kekuatan kolektif masyarakat dalam menghadapi dominasi. Hasil ketiga tingkatan analisis tersebut kemudian dihubungkan untuk menjelaskan pola representasi kekuasaan dan ketimpangan sosial yang muncul dalam keseluruhan adegan terpilih.

Interpretasi hasil analisis semiotik selanjutnya dibandingkan secara kontekstual dengan informasi dari wawancara pendukung dan kajian pustaka. Perbandingan ini dilakukan untuk membedakan konstruksi realitas yang ditampilkan melalui film dengan pandangan informan mengenai praktik penegakan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diarahkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai bagaimana tanda audiovisual membentuk representasi kekuasaan, ketimpangan sosial, dan perjuangan memperoleh keadilan, tanpa menyamakan representasi film dengan keseluruhan kondisi sosial yang terjadi dalam kehidupan nyata.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel berfokus pada perjuangan Jonathan mencari keadilan bagi David Ozora. Konflik berkembang melalui penganiayaan, proses pelaporan, dinamika institusi hukum, penyebaran informasi melalui media sosial, dukungan masyarakat, persidangan, dan putusan pengadilan. Struktur tersebut membuat isu kekuasaan dan ketimpangan sosial hadir berulang melalui hubungan antara tokoh yang memiliki akses sosial dan ekonomi lebih besar dengan pihak yang berada pada posisi korban.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14423
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 1. Enam adegan yang dianalisis dalam film Ozora. Sumber: Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel (Umbara & Umbara, 2026), diolah peneliti.

No.	Waktu	Fokus Analisis
1	00:05:20–00:13:45	Kekuasaan fisik dan dominasi; kekerasan sebagai ekspresi superioritas sosial
2	00:22:15–00:24:54	Ketimpangan akses hukum dan perlakuan berbeda
3	00:48:18–00:49:07	Media sosial sebagai ruang kritik dan perlawanan
4	01:17:25–01:21:22	Ketimpangan sosial dalam institusi hukum
5	01:25:32–01:34:50	Perlawanan dan solidaritas masyarakat
6	01:35:37–01:37:44	Resolusi konflik kekuasaan dan keadilan

3.2 Adegan 1: Penganiayaan Brutal sebagai Ekspresi Dominasi Kekuasaan

Waktu: 00:05:20–00:13:45

Denotasi. Denotasinya memperlihatkan Mario Dandy melakukan kekerasan terhadap David Ozora di sebuah garasi yang dipenuhi mobil mewah. Mario berada dalam posisi fisik dominan, sedangkan David berada dalam keadaan tidak berdaya. Busana kasual mahal, kendaraan, dan setting garasi menjadi tanda visual yang hadir bersamaan dengan tindakan kekerasan.

Konotasi. Secara konotatif, kekerasan tidak hanya dibaca sebagai konflik personal, tetapi sebagai representasi dominasi. Kemewahan lingkungan memperkuat posisi sosial pelaku, sementara sudut kamera rendah ketika Mario berdiri di atas David mempertegas superioritas. Tanda-tanda tersebut menghubungkan kekuatan fisik dengan status sosial.

Mitos. Pada tingkat mitos, adegan membangun gagasan bahwa individu yang berada pada posisi berkuasa dapat bertindak seolah-olah berada di atas konsekuensi hukum. Mitos tersebut menjadi kritik terhadap kondisi sosial ketika status dan relasi dianggap dapat memberikan perlindungan. Dengan demikian, kekuasaan dalam adegan pertama bekerja melalui gabungan fisik, simbol kemewahan, dan posisi sosial.

Sumber: Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel (Umbara & Umbara, 2026), diolah peneliti.

3.3 Adegan 2: Ketimpangan Akses Hukum dan Perlakuan Berbeda

Waktu: 00:22:15–00:24:54

Denotasi. Denotasi memperlihatkan Jonathan datang ke kantor polisi untuk melaporkan penganiayaan, sementara film memperlihatkan kondisi Mario di dalam sel dengan fasilitas yang digambarkan lebih nyaman dan kehadiran pengacara. Jonathan ditampilkan dengan pakaian sederhana dan harus menunggu, sedangkan lingkungan Mario menunjukkan tanda kenyamanan dan dukungan.

Konotasi. Konotasi muncul melalui kontras antara korban dan pelaku. Pakaian, ruang, durasi menunggu, dan kehadiran pendamping hukum membentuk makna tentang perbedaan akses. Institusi yang secara ideal bersifat netral digambarkan melalui pengalaman tokoh yang berbeda, sehingga menghasilkan kesan adanya ketimpangan dalam memperoleh perlakuan hukum.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14423
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Mitos. Pada tingkat mitos, adegan memunculkan gagasan bahwa hukum dapat lebih mudah diakses oleh individu yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Mitos ini bukan sekadar peristiwa dalam cerita, tetapi menghubungkan tanda visual dengan persepsi sosial mengenai ketimpangan akses keadilan.

Sumber: Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel (Umbara & Umbara, 2026), diolah peneliti.

3.4 Adegan 3: Media Sosial sebagai Ruang Perlawanan terhadap Hegemoni

Waktu: 00:48:18–00:49:07

Denotasi. Denotasi menampilkan penyebaran informasi mengenai kasus David melalui media sosial. Layar ponsel, unggahan, komentar, notifikasi, dan dukungan masyarakat menjadi bagian dari adegan. Jonathan dan Melissa mengamati meningkatnya perhatian publik terhadap kasus tersebut.

Konotasi. Konotasinya menunjukkan perubahan sumber kekuatan. Ketika masyarakat tidak memiliki otoritas formal, media sosial menjadi ruang untuk menyampaikan kritik dan membangun solidaritas. Banyaknya komentar dan dukungan memperlihatkan bahwa pengaruh sosial dapat terbentuk melalui partisipasi bersama.

Mitos. Pada tingkat mitos, media sosial diposisikan sebagai saluran keadilan bagi kelompok yang merasa tidak memiliki akses terhadap jalur formal. Mitos ini sekaligus menjadi kritik karena memperlihatkan adanya ketergantungan pada tekanan publik ketika lembaga formal dipersepsikan belum cukup mampu menjawab keresahan masyarakat.

Sumber: Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel (Umbara & Umbara, 2026), diolah peneliti.

3.5 Adegan 4: Ketimpangan Sosial dalam Institusi Hukum

Waktu: 01:17:25–01:21:22

Denotasi. Denotasi berlangsung di ruang sidang. Mellisa menyaksikan proses persidangan, Mario tampil dengan pakaian formal, sedangkan pihak korban digambarkan hanya didampingi satu pengacara. Ekspresi Mellisa menunjukkan kekecewaan, sementara kerumunan jurnalis terlihat di luar gedung pengadilan.

Konotasi. Konotasi dibangun melalui perbedaan dukungan hukum dan posisi sosial. Jumlah serta penampilan pendamping hukum menjadi tanda visual yang mengarahkan pembacaan pada ketidaksetaraan akses. Ekspresi Mellisa memperkuat kesan ketidakberdayaan ketika menghadapi sistem yang secara formal menjanjikan kesetaraan.

Mitos. Pada tingkat mitos, adegan membentuk gagasan mengenai keadilan sebagai sesuatu yang dapat terlihat setara secara institusional, tetapi terasa tidak setara dalam pengalaman sosial. Mitos ini menghubungkan simbol ruang sidang dengan pertanyaan tentang siapa yang mempunyai sumber daya lebih besar untuk menghadapi proses hukum.

Sumber: Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel (Umbara & Umbara, 2026), diolah peneliti.

3.6 Adegan 5: Perlawanan dan Solidaritas Masyarakat

Waktu: 01:25:32–01:34:50

Denotasi. Denotasi menunjukkan Jonathan berpidato di hadapan banyak orang dan meminta keadilan bagi David. Melissa dan Rustam memberikan dukungan, sementara masyarakat dari berbagai latar belakang membawa spanduk dan berkumpul di sekitar proses hukum. Aparat berseragam terlihat berbeda dari kerumunan masyarakat.

Konotasi. Konotasinya adalah munculnya kekuatan kolektif di luar struktur formal. Pidato, spanduk, kerumunan, dan ekspresi dukungan menjadi tanda solidaritas. Perbedaan antara masyarakat sipil dan aparat memperlihatkan ketegangan antara kekuatan rakyat dan otoritas formal.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14423
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Mitos. Pada tingkat mitos, kebersamaan masyarakat ditampilkan sebagai sumber daya bagi kelompok yang tidak mempunyai keistimewaan formal. Film membangun ide bahwa perubahan sosial dapat didorong oleh keberanian kolektif dan tekanan moral masyarakat. Mitos ini memperkuat fungsi film sebagai kritik sosial terhadap dominasi.

Sumber: Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel (Umbara & Umbara, 2026), diolah peneliti.

3.7 Adegan 6: Resolusi Konflik Kekuasaan versus Keadilan

Waktu: 01:35:37–01:37:44

Denotasi. Denotasi menampilkan pembacaan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Mario Dandy. Jonathan dan keluarga korban terlihat emosional, sementara pendukung keadilan di luar pengadilan menyambut putusan. Mario menundukkan kepala dan Rafael Alun digambarkan kehilangan kepercayaan dirinya.

Konotasi. Konotasinya menunjukkan bahwa kekuasaan mempunyai batas. Perubahan ekspresi tokoh berkuasa, tangisan keluarga korban, dan respons masyarakat membentuk makna bahwa perjuangan panjang menghasilkan titik penyelesaian. Putusan hukum menjadi simbol perubahan dari ketegangan menuju pengakuan terhadap keadilan.

Mitos. Pada tingkat mitos, adegan akhir membangun gagasan bahwa keadilan pada akhirnya dapat menang apabila diperjuangkan dan didukung publik. Namun, dalam pembacaan kritis, film juga menunjukkan bahwa keadilan tidak digambarkan hadir secara otomatis; proses menuju keadilan membutuhkan perjuangan, perhatian publik, dan proses institusional.

Sumber: Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel (Umbara & Umbara, 2026), diolah peneliti.

3.8 Makna Denotasi, Konotasi, dan Mitos

Enam adegan menunjukkan bahwa makna kekuasaan dan ketimpangan sosial dibentuk melalui pengulangan tanda. Pada tingkat denotasi, tanda yang paling menonjol adalah tindakan kekerasan, mobil dan ruang mewah, pakaian, ruang kantor polisi, ruang sidang, pengacara, ponsel, kerumunan masyarakat, aparat, dan putusan hakim. Tanda-tanda tersebut membuat persoalan kekuasaan dapat dikenali melalui unsur audiovisual yang konkret.

Pada tingkat konotasi, tanda-tanda tersebut berkembang menjadi makna mengenai privilege, dominasi, ketidaksetaraan akses, dan perlawanan. Kemewahan tidak lagi hanya berfungsi sebagai latar, tetapi dikaitkan dengan posisi sosial pelaku. Ruang hukum tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses hukum, tetapi juga menjadi simbol pengalaman yang berbeda antara kelompok yang mempunyai sumber daya dan kelompok yang lebih lemah. Media sosial kemudian hadir sebagai ruang alternatif bagi masyarakat untuk membangun perhatian dan solidaritas.

Pada tingkat mitos, film menghubungkan tanda dengan ideologi yang lebih luas. Mitos tentang kekuasaan sebagai pelindung, hukum yang dapat dipengaruhi, media sosial sebagai saluran keadilan, dan kekuatan rakyat muncul sebagai pemaknaan yang melampaui peristiwa individual. Dalam kerangka Barthes, mitos bekerja ketika pemaknaan tertentu dibuat tampak wajar. Film sekaligus memperlihatkan dan mempertanyakan kewajaran tersebut melalui konflik antara kekuasaan dan keadilan.

3.9 Temuan Pendukung dari Wawancara

Temuan analisis semiotika terhadap film *Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel* dilengkapi dengan data wawancara bersama Bripda Yanuar Arbiansyah, seorang anggota kepolisian. Informan dipilih sebagai sumber perspektif pendukung karena latar belakang profesinya berkaitan dengan persoalan penegakan hukum yang direpresentasikan dalam film. Wawancara yang dilaksanakan pada 16 Juni 2026 tersebut membahas pandangan informan mengenai pengaruh status sosial dan jabatan terhadap proses hukum, profesionalitas aparat, persepsi ketimpangan hukum, serta peran media sosial dalam membentuk perhatian publik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum. Menurut pandangannya, perbedaan status sosial, jabatan, maupun latar belakang ekonomi tidak seharusnya

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14423
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

memengaruhi perlakuan aparat terhadap pihak yang berhadapan dengan hukum. Pandangan tersebut memberikan perspektif pembanding terhadap representasi dalam film yang menggambarkan adanya perbedaan akses dan perlakuan antara keluarga korban dan pihak pelaku.

Informan juga mengakui adanya persepsi masyarakat mengenai ketimpangan penegakan hukum, khususnya melalui pemberitaan media. Namun, ia menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, profesionalitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tetap menjadi prinsip utama. Pandangan tersebut tercermin dalam pernyataan berikut:

"Kalau realitas penegakan hukum, mungkin kalau dilihat dari media, ya, sepertinya biasanya begitu sih. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi menurut saya sebagai anggota kepolisian, saya selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya." (Bripda Yanuar Arbiansyah, wawancara, 16 Juni 2026).

Kutipan wawancara tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memberikan sudut pandang institusional terhadap persoalan kekuasaan dan ketimpangan hukum yang direpresentasikan dalam film. Dalam konteks perbandingan sumber data, hasil analisis semiotika menunjukkan bahwa film membangun makna mengenai dominasi kekuasaan, privilese sosial, dan ketidaksetaraan akses keadilan. Sementara itu, informasi dari wawancara memperlihatkan pandangan anggota kepolisian yang menekankan prinsip kesetaraan dan profesionalitas dalam penegakan hukum.

Perbandingan kedua sumber tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara konstruksi naratif film dan pandangan informan mengenai praktik penegakan hukum. Perbedaan ini penting karena representasi yang muncul dalam karya audiovisual tidak dapat secara langsung dianggap sebagai gambaran menyeluruh mengenai kondisi institusi kepolisian. Film membangun pemaknaan melalui tanda visual dan naratif, sedangkan wawancara memberikan perspektif berdasarkan posisi serta pengalaman profesional informan.

Dengan demikian, wawancara dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber data pelengkap dalam proses pembandingan dan interpretasi temuan, bukan sebagai pengganti analisis semiotika Roland Barthes. Penggunaan kedua sumber tersebut memungkinkan pembahasan yang lebih kritis mengenai hubungan antara representasi media, persepsi ketimpangan sosial, dan pandangan terhadap penegakan hukum. Namun, karena wawancara hanya melibatkan satu informan, hasilnya tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh anggota kepolisian atau membuktikan secara langsung kondisi faktual yang ditampilkan dalam film.

Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam Ozora bekerja secara berlapis. Lapisan pertama terlihat pada kemampuan fisik dan dominasi langsung. Lapisan berikutnya muncul melalui status sosial, kekayaan, akses pendamping hukum, dan relasi. Lapisan lain hadir melalui institusi dan jaringan sosial. Temuan ini sejalan dengan pembahasan kekuasaan sebagai kemampuan memengaruhi pihak lain, sekaligus dengan pandangan bahwa kekuasaan dapat bekerja melalui jaringan sosial dan lembaga (Salim & Afriza, 2023; Addina & Hanif, 2025).

Ketimpangan sosial dalam film tidak hanya ditampilkan sebagai perbedaan kekayaan. Ketimpangan lebih kuat ketika perbedaan sumber daya tersebut berhubungan dengan kesempatan memperoleh perlakuan hukum. Pakaian, kendaraan, jumlah pendamping hukum, ruang, serta cara tokoh diperlakukan menjadi tanda yang menyatukan aspek ekonomi, status, dan akses institusional. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pembacaan kelas sosial dari sekadar gaya hidup menuju hubungan antara status sosial dan pengalaman menghadapi institusi hukum.

Media sosial dalam film memiliki posisi ganda. Di satu sisi, media sosial menjadi ruang partisipasi publik dan solidaritas. Di sisi lain, penggambaran tersebut menunjukkan bahwa perhatian publik diperlukan untuk memperkuat tekanan terhadap proses yang sedang berlangsung. Dalam perspektif semiotika Barthes, posisi ganda tersebut dapat dibaca sebagai mitos kontemporer mengenai kemampuan teknologi digital untuk menghadirkan suara masyarakat ketika jalur formal dianggap tidak cukup responsif.

Secara keseluruhan, enam adegan membentuk alur makna dari dominasi menuju perlawanan dan penyelesaian. Adegan awal menempatkan kekuasaan sebagai dominasi fisik dan privilege, adegan tengah menunjukkan ketimpangan akses serta peran media sosial dan solidaritas, sedangkan adegan akhir memberikan resolusi melalui putusan hukum. Pola tersebut menjadikan film sebagai kritik sosial karena tanda-tanda yang digunakan tidak hanya

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14423
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menggerakkan cerita, tetapi juga mengarahkan penonton untuk melihat hubungan antara kekuasaan, ketimpangan, hukum, dan masyarakat.

Pembacaan Kekuasaan melalui Tanda Audiovisual

Hasil penelitian menunjukkan bahwa film membangun representasi kekuasaan melalui kombinasi tanda yang saling menguatkan. Kekerasan pada adegan pertama tidak berdiri sendiri karena ditempatkan dalam ruang yang menampilkan kemewahan. Ketika tindakan fisik disandingkan dengan mobil dan lingkungan yang berkelas, penonton diarahkan untuk menghubungkan kekerasan dengan posisi sosial pelaku. Dalam kerangka Barthes, hubungan tersebut menunjukkan bagaimana tanda literal berkembang menjadi makna konotatif. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya terlihat dari kemampuan melakukan tindakan fisik, tetapi juga dari konteks sosial yang mengelilingi tindakan tersebut.

Pada adegan kedua dan keempat, institusi hukum menjadi ruang penting untuk memperlihatkan ketimpangan. Film tidak hanya memperlihatkan adanya proses pelaporan atau persidangan, tetapi memilih detail tertentu seperti waktu menunggu, kondisi ruangan, pakaian, jumlah pendamping hukum, ekspresi tokoh, dan keberadaan media. Detail tersebut membangun kontras antara pihak yang mempunyai sumber daya lebih besar dan pihak yang berada dalam posisi korban. Representasi tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan sosial dapat dipahami sebagai persoalan akses, bukan semata-mata perbedaan kepemilikan ekonomi.

Penggunaan ruang institusional juga mempunyai fungsi simbolik. Kantor polisi dan ruang pengadilan secara denotatif merupakan tempat berlangsungnya proses hukum. Namun pada tingkat konotasi, ruang tersebut menjadi simbol harapan terhadap keadilan sekaligus tempat munculnya ketegangan antara prinsip kesetaraan dan pengalaman tokoh. Pada tingkat mitos, film mempertanyakan gagasan bahwa keberadaan lembaga hukum secara otomatis menghasilkan keadilan. Hal ini membuat analisis tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang benar atau salah dalam cerita, melainkan melihat bagaimana institusi direpresentasikan melalui tanda.

Relasi Kekuasaan, Privilege, dan Ketimpangan Sosial

Privilege dalam film direpresentasikan sebagai keuntungan yang melekat pada posisi sosial tertentu. Keuntungan tersebut tidak selalu ditunjukkan melalui dialog yang secara eksplisit menyebut kekuasaan, tetapi melalui benda, ruang, pakaian, pendamping, dan cara tokoh ditempatkan dalam cerita. Pada tingkat denotasi, penonton melihat objek dan tindakan; pada tingkat konotasi, objek tersebut dikaitkan dengan kelas sosial dan kemampuan memperoleh dukungan; sedangkan pada tingkat mitos, privilege dapat dibaca sebagai gagasan mengenai perlindungan yang diterima oleh pihak yang mempunyai kedekatan dengan kekuasaan.

Temuan ini memperlihatkan hubungan erat antara kekuasaan dan ketimpangan sosial. Kekuasaan menghasilkan kemampuan untuk memengaruhi situasi, sedangkan ketimpangan menunjukkan adanya perbedaan sumber daya dan kesempatan. Dalam film, keduanya bertemu ketika status sosial dikaitkan dengan akses terhadap proses hukum. Karena itu, representasi ketimpangan tidak hanya berada pada perbedaan antara kaya dan tidak kaya, tetapi pada perbedaan kemampuan menghadapi institusi dan mempertahankan kepentingan.

Pandangan tersebut berhubungan dengan penelitian Prasetya (2022) mengenai representasi kelas sosial dalam film Gundala yang menunjukkan bagaimana pendidikan, kekayaan, jabatan, konflik, dan tempat tinggal dapat menjadi penanda kelas. Penelitian Ozora memperlihatkan arah yang berbeda karena penanda kelas tersebut ditempatkan dalam konteks relasi kekuasaan dan proses hukum. Dengan demikian, objek yang dianalisis bukan hanya strata sosial, tetapi bagaimana posisi sosial berhubungan dengan dominasi dan pengalaman memperoleh keadilan.

Media Sosial sebagai Bentuk Kekuasaan Alternatif

Adegan ketiga dan kelima menunjukkan adanya pergeseran sumber kekuatan. Jika adegan awal lebih banyak menampilkan kekuasaan sebagai dominasi pihak tertentu, kedua adegan tersebut menunjukkan masyarakat sebagai aktor yang mempunyai kemampuan membentuk tekanan sosial. Media sosial memungkinkan informasi mengenai kasus menyebar dan membentuk perhatian publik. Sementara itu, kerumunan masyarakat, pidato Jonathan, dan spanduk menjadi tanda solidaritas dalam ruang publik.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14423
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dalam pembacaan Barthes, tanda digital seperti layar ponsel dan notifikasi bukan sekadar benda. Tanda tersebut membawa makna tentang partisipasi, perhatian, dan pengawasan masyarakat. Ketika masyarakat menggunakan media sosial untuk membicarakan suatu perkara, kekuasaan tidak lagi hanya berasal dari lembaga formal. Pengaruh dapat muncul dari banyak orang yang memberikan perhatian secara bersamaan. Film dengan demikian menampilkan media sosial sebagai ruang komunikasi yang dapat mengubah posisi kelompok yang sebelumnya digambarkan lemah.

Namun, representasi tersebut juga perlu dibaca secara kritis. Media sosial tidak secara otomatis identik dengan keadilan. Dalam penelitian ini, media sosial dibaca berdasarkan fungsi yang diberikan film, yaitu sebagai saluran perhatian dan tekanan publik. Artinya, temuan penelitian bukan menyatakan bahwa media sosial selalu mampu menghasilkan keadilan, tetapi bahwa film mengonstruksinya sebagai salah satu bentuk kekuatan sosial dalam konflik yang diceritakan.

Hubungan Temuan dengan Teori Roland Barthes

Enam adegan memperlihatkan kegunaan konsep tiga tingkat pemaknaan Barthes dalam membaca film. Denotasi membantu peneliti menginventarisasi apa yang tampak dan terdengar secara langsung sehingga analisis memiliki dasar observasional. Konotasi kemudian digunakan untuk menghubungkan tanda dengan konteks sosial, misalnya kemewahan dengan status, ruang sidang dengan akses hukum, dan kerumunan dengan solidaritas. Tahap mitos memperluas analisis dengan melihat bagaimana pemaknaan tersebut berhubungan dengan ideologi dan keyakinan sosial yang dibuat tampak wajar.

Penerapan tiga tingkat pemaknaan tersebut juga menjelaskan mengapa objek penelitian tidak cukup dianalisis melalui sinopsis. Sinopsis hanya menjelaskan peristiwa utama, sedangkan semiotika membaca bagaimana peristiwa tersebut dibangun. Sudut kamera, kostum, setting, ekspresi, benda, dialog, dan penyuntingan dapat memberikan makna yang tidak selalu dijelaskan secara langsung oleh alur. Oleh sebab itu, semiotika Roland Barthes sesuai dengan tujuan penelitian untuk menemukan makna yang berada di balik tanda-tanda audiovisual.

Keterkaitan dengan Data Wawancara

Data wawancara memberikan konteks pembanding terhadap temuan semiotik. Bripda Yanuar Arbiansyah menyatakan bahwa status sosial dan jabatan, menurut pandangannya, tidak seharusnya memengaruhi penegakan hukum dan setiap pihak yang berkasus diproses sesuai hukum. Pernyataan tersebut penting karena film justru membangun representasi mengenai ketimpangan akses dan pengaruh kekuasaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa representasi media merupakan konstruksi naratif dan tidak dapat secara langsung digeneralisasikan sebagai gambaran seluruh institusi.

Informan juga menjelaskan bahwa dirinya belum pernah merasakan tekanan dari pihak tertentu dalam menjalankan tugas dan menekankan profesionalitas. Sementara itu, film menggunakan konflik dan tekanan publik sebagai bagian dari alur dramatik. Dengan menempatkan dua sumber tersebut secara berdampingan, penelitian dapat mempertahankan posisi analitis: film dibaca sebagai teks media, sedangkan wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memberikan perspektif mengenai praktik penegakan hukum. Cara ini membantu menghindari kesimpulan bahwa semua pengalaman aparat identik dengan representasi yang muncul dalam film.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14423
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)



Gambar 1. Poster Film Ozora (Penganiayaan Penguasa Jaksel)

Sumber: Materi promosi resmi film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel (2026). Hak cipta poster dimiliki oleh pemegang hak terkait.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa film *Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel* merepresentasikan kekuasaan dan ketimpangan sosial melalui tanda visual, dialog, tindakan, latar, kostum, gestur, serta alur cerita. Berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes terhadap enam adegan terpilih, kekuasaan dalam film dikonstruksikan melalui dominasi fisik, simbol kemewahan, status sosial, relasi, dan perbedaan akses terhadap proses hukum. Temuan tersebut menggambarkan cara film membangun pemaknaan mengenai hubungan antara kekuasaan, ketimpangan sosial, dan perjuangan memperoleh keadilan. Pada tingkat denotasi, representasi tersebut terlihat melalui tindakan kekerasan, kendaraan mewah, penampilan tokoh, situasi di kantor polisi dan ruang persidangan, serta keterlibatan masyarakat. Pada tingkat konotasi, tanda-tanda tersebut membentuk makna mengenai dominasi, privilese, ketidaksetaraan akses, tekanan publik, dan solidaritas sosial. Sementara itu, pada tingkat mitos, film membangun pemaknaan mengenai kekuasaan sebagai bentuk perlindungan sosial, kemungkinan adanya pengaruh status terhadap akses keadilan, serta peran media sosial dan solidaritas masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi. Hasil wawancara dengan Bripda Yanuar Arbiansyah memberikan perspektif pendukung yang menekankan prinsip profesionalitas dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Perbedaan antara pandangan informan dan penggambaran dalam film menunjukkan pentingnya membedakan representasi audiovisual dengan kondisi faktual institusi hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini terbatas pada analisis tanda dan makna yang dikonstruksikan dalam film, sehingga tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi praktik penegakan hukum atau kinerja institusi hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, film *Ozora* dapat dipahami sebagai media kritik sosial yang mengangkat persoalan kekuasaan, ketimpangan sosial, dan keadilan melalui konstruksi naratif serta simbol audiovisul.

Reference

1. Addina, N., & Hanif, M. (2025). Pendidikan dan kekuasaan: Antara pembebasan dan dominasi perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 2(4), 196–210.
2. Chaniago, P., & Sos, S. (2019). Representasi pendidikan karakter dalam film Surau dan Silek (analisis semiotik Ferdinand de Saussure). Journal of Islamic Education, 4, 135–151.
3. Fadhila, D. P., Almira, C., & Priatnama, A. (2022). Metode penelitian analisis semiotik media sosial. Jurnal of Dakwah dan Communication, 1(2).
4. Fadhillah, M., & Mulyazir, M. (2023). Konsep semiotika Roland Barthes dan aplikasinya terhadap kajian Al-Quran. Jurnal Studi Islam Hukum dan Pendidikan Islam, 3(1), 28–37.
5. Fiskal, B. K. (2022). Analisis ketimpangan gender spasial dan pengaruhnya terhadap perekonomian wilayah.
6. Fitra, V. N., & Prihatmoko, J. (2026). Analisis representasi kekuasaan politik film Dirty Vote dalam perspektif Norman Fairclough. Spektrum, 23(1), 91–109.
7. Fitrianti, R., & Hanaf, A. A. (2025). Representasi identitas remaja melalui budaya tren di media sosial. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(3), 283–297.
8. Prasetya, T. L. (2022). Representasi kelas sosial dalam film Gundala (analisis semiotika Roland Barthes). Jurnal Audiens, 3.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14423
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

9. Purbhawadi, K., Suastika, N. I., & Yudiawan, H. G. D. (2026). Pembaharuan hukum pidana terhadap tindak penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 3.
10. Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode pengumpulan data kualitatif. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9, 13074–13086.
11. Reisa, S., & Irwansyah, I. (2021). Fragmentation and audience activity on video-on-demand platform: Netflix and the binge-watching. Jurnal InterAct, 2.
12. Salim, K., & Efriza. (2023). *Sosiologi kekuasaan: Teori dan perkembangan*. Bumi Aksara.
13. Sulianta, F. (2024). *Semiotika digital*. Feri Sulianta.
14. Sumarno, M. (2017). *Apresiasi film*. Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Umbara, A., & Umbara, B. (Sutradara). (2025). *Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel* [Film]. Umbara Brothers Film. Tersedia melalui Netflix: https://www.netflix.com/id/title/82180374
16. Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). Magister Administrasi Pendidikan, 7, 2896–2910.
17. Yusuf, M. A. (2022). Teori kekuasaan: Pengertian, legitimasi, dan sumber kekuasaan.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14423
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)